



DOKUMEN **RENCANA KERJA**

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

2024

Jalan Gajah Mada 109 Praya 83511

Email : siak.loteng@gmail.com /

dukcapil.loteng.2022@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Mari Kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tersusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut Dokumen Renja ini disusun agar menjadi acuan dan pedoman para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah pada tahun 2024, yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang dirumuskan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Dokumen ini sekaligus merupakan salah satu bentuk ikhtiar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan **Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat dan membahagiakan**, yang sesuai dengan tujuan strategis Kabupaten Lombok Tengah dalam misi ke 3 RPJMD 2021-2026 yaitu **Mewujudkan Pelayanan Pelayanan Pemerintahan yang cepat, mudah dan bersih**.

Kami sadar bahwa penyusunan dokumen renja ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari sistematika maupun substansi yang ada dalam dokumen ini, untuk itu kami harapkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi penyempurnaan dokumen renja ini kedepannya.

Praya, Juli 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196605251986082005

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	10
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	20
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	23
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
BAB III – TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	32
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	33
BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	35
BAB V – PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra.....	13
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	19
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Stakeholders	31
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023.....	34
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPERIDA dan pemangku kepentingan. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyusunan rancangan awal rencana kerja;
- c. Penyusunan rancangan rencana kerja;

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / musrenbang rencana kerja;
- e. perumusan rancangan akhir rencana kerja; dan
- f. penetapan rencana kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah adalah menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja setiap tahun, sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai:

- a. Acuan dasar pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tahun yang telah ditetapkan;
- b. Jembatan antara Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (RPJPD dan RPJMD) dengan RKPD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah; dan
- c. Sebagai bentuk *sinergi* dan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah disusun secara terpadu, aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengamanatkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain meliputi :

Persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK), Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el), Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dan Persentase penduduk yang memiliki Akta Kematian. Hal tersebut selaras dengan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat saat ini serta selaras dengan Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain:

- a. Kewenangan pencetakan KTP elektronik dilimpahkan ke Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.
- b. Pola Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semula penduduk diwajibkan aktif sebagai pemohon, diubah menjadi Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan pola *stelsel* aktif untuk melayani masyarakat sampai dengan tingkat terbawah.
- c. Kegiatan pencetakan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).

Selanjutnya agar berbagai program dan kegiatan yang telah disusun pada tahun anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik maka kami telah menuangkan strategi-strategi penerapan kebijakan dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan

dan potensi yang dimiliki serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul, yang semuanya tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja ini.

Dengan adanya dokumen Rencana Kerja ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan (*Stakeholder*) khususnya dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah juga sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagaiberikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan E-KTP Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 440 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Pencapaian Indikator Kinerja Tahunan Standar Pelayanan Minimal Sipil di Kabupaten Lombok Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai:

- a. Penetapan dokumen resmi perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 yang menggambarkan sinergitas dan kesinambungan dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;
- b. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bagi Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara itu, tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini adalah sebagai:

1. Evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023;
2. Penyusunan kembali program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil evaluasi agar lebih terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026;
3. Sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikan melalui program/kegiatan urusan wajib perangkat daerah dan program/kegiatan non urusan perangkat daerah.

Program/Kegiatan Urusan Wajib Perangkat Daerah terdiri atas 4 (empat) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 9 (sembilan) sub-kegiatan. Untuk program/kegiatan non urusan perangkat daerah terdiri atas 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub-kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PERANGKAT DAERAH

a. Program PendaftaranPenduduk

▪ Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan atas Pendaftaran Penduduk

▪ Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- Pelayanan Secara Aktif Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk

b. Program Pencatatan Sipil

▪ Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan Sipil
- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Formulir, Blangko KTP-el, dan Buku terkait Pencatatan Sipil
- **Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
 - Pelayanan Secara Aktif Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
- c. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 - **Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan**
 - Kerjasama Data Kependudukan
 - **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
 - **Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**
 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN NON URUSAN PERANGKAT DAERAH

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**
 - **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Berikut Tabel mengenai uraian terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah

Ko de	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Pemerintah Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
PROGRAM / KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		- Persentase kepemilikan KTP-elektronik	99,01%	99,00%	98,07%	98,90%	100,85%	98,54%	296%	299,40%
		- Persentase penerbitan KIA	49,92%	40%	29,92%	44,81%	149,77%	49%	134%	268,05%
		- Persentase Penerbitan Surat Pindah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	300%	300,00%
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	3	3	3	100%	3	3	100%

	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	125	0	0	0	100 %	100	100	80%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	16500	3	3	3	100 %	15000	15000	91%
	Kegiatan Penyelenggaraan PendaftaranPenduduk	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	13	1	1	1	100 %	2	2	15%
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	30000	1	1	1	100 %	1	1	0%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		- Persentase Kepemilikan Akta Lahir	98,00%	96,50%	97%	98,80 %	101,86%	98%	98,35%	100%
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	40000	8	8	8	100 %	8	8	0%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pencatatan Sipil	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pencatatan Sipil	2	2	2	2	100 %	2	2	100%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase OPD Yang Telah Melaksanakan Kerjasama	12%	3%	6%	11,36 %	189 %	9%	20,45%	170%
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15	1	3	3	100 %	3	9	60%
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan Pemanfaatan data kependudukan	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jaringan SIAK	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	4	4	4	100 %	4	4	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	3%	3%	3%	3%	100 %	3%	3%	100%
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Dokumen Data/Profil Kependudukan yang valid	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
PROGRAM / KEGIATAN NON URUSAN PERANGKAT DAERAH										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP OPD	BB	B	CC	CC	#VA LUE!	B	B	#VALUE!
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	1	1	1	1	100 %	1	1	100%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2	2	2	2	100 %	2	2	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penerimaan	12	12	12	12	100 %	12	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	18	18	18	18	100 %	18	18	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi	10	10	10	10	100 %	10	10	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat dan Konsultasi	10	10	10	10	100 %	10	10	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan/Bulan	12	12	12	12	100 %	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan	1	1	1	1	100 %	1	1	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya BMD	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	11	11	11	11	100 %	11	11	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1	1	1	1	100 %	1	1	100%

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, tolok ukur pengukuran kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja. indikator kinerja dalam Renstra dimaksud terdiri dari Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut kami sajikan Indikator Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah:

1. Indikator Tujuan (Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan) dapat diukur dari Level Kinerja, yakni merupakan sebuah instrument pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai kemampuan dan kinerja Dinas Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, dimana komponen-komponen pengukurannya meliputi setiap aspek utama dan aspek pendukung kinerja layanan adminduk. Setiap akhir tahunnya, nilai dari Level Kinerja akan dipublikasi dalam oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam rapat koordinasi dengan seluruh unsur pimpinan Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Indikator Sasaran (Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Layanan Adminduk), dapat dilihat dari :
 - a) Indeks Kepuasan Masyarakat, merupakan nilai kuantitatif yang didapat dari hasil pengukuran terhadap aspek-aspek

pelayanan. Adapun aspek-aspek dimaksud meliputi: kejelasan informasi layanan, kemudahan prosedur, kesesuaian syarat, keberadaan, tanggungjawab, kemampuan dan etika petugas pelayanan, ketepatan waktu penyelesaian, kenyamanan layanan dan kelengkapan fasilitas.

- b) Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan, merupakan akumulasi nilai rata-rata dari target capaian dokumen adminduk selama setahun, yang meliputi seluruh produk layanan adminduk yang masuk dalam target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

3. Indikator Kinerja Utama, terdiri atas:

- a. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dengan kelompok sasaran penduduk usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta lahir.
- b. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan kelompok sasaran masyarakat wajib KTP-el di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan kelompok sasaran anak (penduduk usia 0-17 tahun>1hari) yang belum memiliki Kartu Identitas Anak.
- d. Persentase penerbitan Surat Pindah-Datang dengan kelompok sasaran masyarakat yang akan keluar dan berdomisili di luar Lombok Tengah namun masih tercatat sebagai warga Lombok Tengah dan sebaliknya.
- e. Persentase Kerjasama Layanan Adminduk, dilihat dari Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang

melaksanakan Kerjasama layanan dengan melibatkan Dinas Dukcapil Lombok Tengah.

- f. Persentase Pemanfaatan Data, yaitu jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang data adminduk sebagai base data, data pendukung maupun data pembanding dalam menyelenggarakan urusan perangkat daerahnya.

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel pencapaian Indikator Kinerja Utama di bawah ini:

Tabel 2.2
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun - n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran			97.00	97.50	98.00	98.50	98.80	99.00	99.20	99.40	Tercapai
2	Persentase Kepemilikan KTP-el			98.07	98.54	99.01	99.48	98.90	99.00	99.10	99.20	Tercapai
3	Persentase Penerbitan KIA			29.92	39.92	49.92	59.92	44.81	50.81	56.81	62.81	Tercapai
4	Persentase Penerbitan Surat Pindah			n/a	100,00	100,00	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase Kerjasama Layanan			6%	9%	12%	15%	11.36%	20.45%	33.3%	44.4%	Tercapai
6	Persentase Pemanfaatan Data Admuduk			3%	3%	3%	3%	10%	20.45%	33.3%	44.4%	Tercapai

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa keseluruhan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, keseluruhan indikator dapat dikatakan sudah tercapai bahkan melampaui target pencapaian.

Hal tersebut dikarenakan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam berinovasi meningkatkan pelayanan dengan beberapa hal diantaranya:

a) Begerusuk (Bersama Gerakan Urusan Administrasi Kependudukan)

Pelayanan ini dilakukan dengan 2 metode dalam pelaksanaannya yaitu Pelayanan Keliling dan Pelayanan Road to School. Pelayanan keliling sendiri dilakukan dengan menyambangi gubuk/desa yang sebelumnya telah dilakukannya koordinasi dengan perangkat desa yang memerlukan pelayanan secara langsung di desa agar memudahkan masyarakat dalam kepengurusan sehingga tidak perlu masyarakat mengantri di loket kantor Dukcapil, cukup dengan mengurus di kantor desa setempat. Sedangkan untuk pelayanan Road to school dilakukan dengan cara menyambangi sekolah tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat untuk melakukan perekaman data awal sebelum nantinya siswa/siswi yang bersangkutan secara hukum sudah sah untuk memiliki kartu identitas dapat dilakukan pencetakan di kemudian hari, pelayanan road to school juga dilakukan pada tingkat TK/PAUD/ sederajat untuk dilakukan perekaman data KIA (Kartu Identitas Anak) mengingat tingginya tingkat pertumbuhan penduduk usia 0-17 tahun.

b) Pelayanan 3 in 1

Inovasi pelayanan ini merupakan pelayanan terintegrasi antar bidang yang berbeda di dukcapil dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh 3 dokumen

kependudukan sekaligus dalam 1 kali pelayanan, contohnya jika terdapat penambahan anggota keluarga baru (kelahiran/pernikahan) masyarakat akan mendapatkan 3 dokumen baru sesuai dengan data perubahan yang dilakukan saat itu juga.

c) TAPE KIA (Tuntaskan Kepemilikan KIA)

Pelayanan ini merupakan pelayanan yang dikhususkan untuk kepemilikan KIA yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan kepala sekolah tingkat TK/PAUD/ sederajat untuk dapat menghimpun data siswa-siswi yang akan lulus sehingga pelayanan tidak mengganggu jalannya Pendidikan dihari itu karna dapat dilakukan di kantor dukcapil dengan hanya berlandaskan dari penghimpunan data sesuai dengan persyaratan pembuatan dokumen KIA.

d) PEDATI ONTA (Pemutakhiran Data Kematian dan Konsolidasi Data)

Pelayanan ini merupakan inovasi untuk pemutakhiran data kematian yang masih belum maksimal dengan cara mengaktifkan Kembali buku pokok pemakaman per desa untuk dapat melaporkan secara real time angka kematian di tingkat desa sehingga data kependudukan yang disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

e) NONA AYU (Pelayanan Dokumen Kependudukan bersampa Posyandu)

Pelayanan ini merupakan kerja sama dinas kependudukan pencatatan sipil dengan layanan posyandu pada puskesmas di kabupaten Lombok tengah yang memanfaatkan kebutuhan akan Kesehatan yang berhubungan erat dengan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya pada anak yang baru lahir.

f) SE-MAIK (Sistem Layanan Dokumen Online)

Pelayanan SE-MAIK merupakan pelayanan pengajuan pembuatan dokumen kependudukan yang memanfaatkan teknologi yang ada sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengajukan

pembuatan/pencetakan Kembali dokumen kependudukan dari rumah sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien.

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan sudah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tercapainya hampir semua Indikator Kinerja Utama. Namun meski demikian, tentunya masih terdapat berbagai masalah yang cukup krusial dan mendasar serta harus segera mendapat solusi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur (Penyelenggara) masih belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan jumlah Pegawai di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berjumlah 45 orang ASN dan 33 Orang Tenaga Honorer, hal ini masih belum sepadan dengan jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang sudah mencapai 1.082.573 jiwa, sehingga dapat diasumsikan 1 orang pegawai harus menangani 13.879 jiwa penduduk. Hal tersebut juga akan semakin riskan apabila dikaitkan dengan kualitas Sumber Daya Aparatur, dimana sebagian besar tingkat pendidikan petugas SMA/Sederajat dan belum semuanya mendapatkan pelatihan terkait tugasnya sebagai operator adminduk.
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, hal ini ditunjukkan dengan tidak tersedianya fasilitas penunjang pelaksanaan Pelayanan Adminduk seperti:
 - a. mesin antri otomatis;
 - b. ruang tunggu khusus bagi penggunaan berkebutuhan khusus, lansia, ibu hamil dan menyusui;

- c. kondisi kantor yang masih sangat tidak representatif untuk memberikan pelayanan public; dan
 - d. Kekurangan armada dan alat rekam untuk pelaksanaan pelayanan keliling adminduk.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, hal ini dibuktikan dengan kurangnya pemahaman masyarakat saat dilakukan sosialisasi.
 4. Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga/instansi terkait yang masih rendah.

Adapun Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 terkait Isu-Isu strategis Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dijumpai bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu isu yang masih perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah kabupaten Lombok Tengah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan berujung pada peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui peningkatan kapabilitas dan integritas sumberdaya manusia, penyediaan system layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik yang didukung sarana prasarana memadai.

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 dijumpai beberapa masalah terkait dengan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

- 1) Penduduk yang termasuk dalam wajib KTP belum seluruhnya memiliki KTP yaitu dari 765.783 jiwa di tahun 2022 baru 727.199 jiwa (97.80%) yang sudah memiliki KTP, padahal KTP-el merupakan dokumen yang sangat mendasar bagi seorang penduduk untuk

melegalkan status kependudukan serta untuk mengurus hampir semua aspek administrasi lainnya.

- 2) Dari keterangan terkait jumlah wajib penduduk di atas, terindikasi bahwa sebagian dari wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el terdiri dari kelompok remaja yang baru beranjak 17 tahun, disusul dengan sebagian penduduk yang status kependudukannya masih tercatat di Lombok Tengah namun berada di luar daerah, dan sisanya adalah dikarenakan beberapa perubahan kondisi kependudukan (kematian, pindah keluar) yang tidak dilaporkan sehingga sedikit menyulitkan kami dalam melakukan updating data secara valid dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas perlu koordinasi dan sinergitas yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik antara Perangkat Daerah maupun dengan Lembaga/Instansi terkait. Adapun upaya yang dapat ditempuh untuk memberikan solusi di atas adalah:

- 1) Penyesuaian Regulasi dan Standarisasi Pelayanan;
- 2) Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pelayanan, baik melalui Bimtek/Workshop dan kegiatan sejenisnya;
- 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan; dan
- 4) Peningkatan Kerjasama Pelayanan dengan Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi lain.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum gabungan perangkat daerah. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan anggaran sebesar Rp. 8.391.745.909,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
KODE	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.12.02.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,01%	151.430.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,01%	256.216.122	
			Persentase Kepemilikan KIA	49,92%				Persentase Kepemilikan KIA	49,92%		
			Persentase Penerbitan Surat Pindah	100%				Persentase Penerbitan Surat Pindah	100%		
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen	3 Dokumen	65.750.000	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen	3 Dokumen	91.479.242	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Lombok Tengah	Jumlah Pendataan	125 Dokumen	15.750.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Lombok Tengah	Jumlah Pendataan	125 Dokumen	10.059.182	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	16500 Dokumen	50.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	16500 Dokumen	81.420.060	
2.12.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Laporan Hasil	1 Laporan	85.680.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Laporan Hasil	1 Laporan	164.736.880	

2.12.02.2. 02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Lomb ok Teng ah	Jumlah Dokumen	32400 Dokume n	85.680.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Lomb ok Teng ah	Jumlah Dokumen	32400 Dokume n	164.736.880	
2.12.03. 2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	98%	178.366.742	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	98%	182.020.380	
2.12.03.2. 01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen	4 Dokume n	178.366.742	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen	4 Dokume n	182.020.380	
2.12.03.2. 01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan Sipil	Lomb ok Teng ah	Jumlah Dokumen	1 Dokume n	15.750.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan Sipil	Lomb ok Teng ah	Jumlah Dokumen	1 Dokume n	79.824.060	
2.12.03.2. 01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Lomb ok Teng ah	Jumlah Layanan Ditingkatka n	2 Layana n	162.616.742	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Lomb ok Teng ah	Jumlah Layanan Ditingkatka n	2 Layana n	102.196.320	
2.12.04. 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		OPD yang telah melaksanak an kerjasama	12%	78.574.396	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		OPD yang telah melaksanak an kerjasama	12%	177.973.064	
2.12.04.2. 01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Laporan Pemanfaata n data kependuduk an	1 Laporan	50.000.000	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Laporan Pemanfaata n data kependuduk an	1 Laporan	45.100.000	
2.12.04.2. 01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Lomb ok	Jumlah Dokumen	15 Dokume n	50.000.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Lomb ok	Jumlah Dokumen	15 Dokume n	45.100.000	

		Teng ah					Teng ah				
2.12.04.2. 03	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lomb ok Teng ah	laporan pengelolaan Informasi Adminduk	1 Laporan	20.000.000	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lomb ok Teng ah	laporan pengelolaan Informasi Adminduk	1 Laporan	64.500.000	
2.12.04.2. 03.03	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	64.500.000	
2.12.04.2. 03	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Jumlah Laporan	1 Laporan	8.574.396	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Jumlah Laporan	1 Laporan	68.373.064	
2.12.04.2. 03.03	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Jumlah Laporan	1 Laporan	0	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Jumlah Laporan	1 Laporan	17.582.960	
2.12.04.2. 03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Jumlah Laporan	1 Laporan	8.574.396	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Lomb ok Teng ah	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.790.104	
2.12.05. 2	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase OPD yang memanfaat kan data kependuduk an	3%	35.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase OPD yang memanfaat kan data kependuduk an	3%	16.900.000	

2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan		Dokumen Kependudukan	1 Dokumen	35.000.000	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan		Dokumen Kependudukan	1 Dokumen	16.900.000	
2.12.05.2.01.01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	16.900.000	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip	B	6.163.622.417	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip	B	7.758.636.343	
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		IKU OPD tercapai	100%	60.935.787	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		IKU OPD tercapai	100%	39.036.183	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	4.438.601	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.309.950	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.856.628	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.530.951	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	5.600.693	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	4.472.042	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan	2 Laporan	13.540.907	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan	2 Laporan	11.219.282	

2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	28.392.380	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lombok Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.397.380	
2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Gaji	100%	333.660.932	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Gaji	100%	4.016.381.770	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lombok Tengah	Jumlah Penerima	45 orang	333.660.932	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lombok Tengah	Jumlah Penerima	45 orang	3.959.092.995	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Lombok Tengah			-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Lombok Tengah	Jumlah Laporan	18 Laporan	50.843.353	
2.12.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan	100%	19.201.500	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan	100%	13.376.554	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lombok Tengah	Jumlah Orang	45 Orang	19.201.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Lombok Tengah	Jumlah Orang	45 Orang	13.376.554	
2.12.01.2.05	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase BMD Baik	95%	19.201.500	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah		Persentase BMD Baik	95%	13.376.554	
2.12.01.2.05.10	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lombok Tengah	Jumlah Laporan	1 Laporan	19.201.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lombok Tengah	Jumlah Laporan	1 Laporan	13.376.554	
2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan	100%	74.639.520	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan	100%	82.498.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lombok	Jumlah Laporan	30 Laporan	74.639.520	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lombok	Jumlah Laporan	30 Laporan	82.498.000	

		Tengah					Tengah				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lombok Tengah	Persentase Pelaksanaan		-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lombok Tengah	Persentase Pelaksanaan	100%	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lombok Tengah			-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lombok Tengah			-	
2.12.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lombok Tengah	Persentase Penyediaan	100%	-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lombok Tengah	Persentase Penyediaan	100%	566.296.620	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lombok Tengah	Jumlah Laporan	12 Laporan	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lombok Tengah	Jumlah Laporan	12 Laporan	173.080.620	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Lombok Tengah	Persentase	100%	-	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Lombok Tengah	Persentase	100%	393.216.000	
2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lombok Tengah	Persentase Pemeliharaan	100%	130.506.860	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lombok Tengah	Persentase Pemeliharaan	100%	120.007.200	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lombok Tengah	Jumlah Unit	11 Unit	80.506.860	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lombok Tengah	Jumlah Unit	11 Unit	105.007.200	

2.12.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lomb ok Teng ah	Jumlah Bangunan	1 Bangun an	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lomb ok Teng ah	Jumlah Bangunan	1 Bangun an	15.000.000	
	Jumlah :				6.606.993.555					8.391.745.909	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja harus memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, dari hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah tidak terdapat usulan atau aspirasi masyarakat yang langsung mengarah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, mengingat tugas wajib dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah adalah dalam hal penerbitan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil, sehingga menjadi unsur *supporting* dari perangkat daerah lain yang membutuhkan pelayanan maupun penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2024 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah:

- 1) Pemutakhiran Data Penduduk;
- 2) Pemberian Nomor Induk Kependudukan;
- 3) Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 4) Penerapan Identitas Kependudukan Digital; dan
- 5) Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”.

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan secara maksimal, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahapan pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan penerapan. Pada tahun 2024 ini, penerapan KTP elektronik terus dilaksanakan dengan kelompok sasaran penduduk wajib KTP, dalam bentuk pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen dikarenakan rusak dan hilang.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang sungguh-sungguh dari pengelola program dan para pemangku kepentingan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1) Tujuan Renja Perangkat Daerah

Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan, melalui:

- a. Peningkatan Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan;
- b. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

2) Sasaran Renja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Administrasi Kependudukan, melalui :

- a. Penyesuaian Regulasi Administrasi Kependudukan yang relevan dan adaptif dengan kondisi terkini;
- b. Meningkatnya jumlah perangkat daerah dan Lembaga/instansi yang melaksanakan Kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan;
- c. Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Peningkatan profesionalitas dan kompetensi Petugas Pemberi Layanan Administrasi Kependudukan; dan
- e. Meningkatnya kualitas *database* kependudukan.

Secara lebih rinci, tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pelayanan Adminduk	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	98,35%	98,00%
			Persentase Kepemilikan KTP-elektronik	97,80%	99,01%
			Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	42,72%	49,92%
			Persentase Penerbitan Surat Pindah	100,00%	100,00%
			Persentase Kerjasama Pelayanan	33 %	12 %
			Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data	33 %	3%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 ini, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap pemilihan dan perumusan program dan kegiatan adalah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)”, dengan mengusung Misi Pembangunan ke 3 yaitu “Mewujudkan Pelayanan Umum Pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih”.

Adapun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 tersebut disebutkan beberapa arah kebijakan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

- 1) Standarisasi dan Penyesuaian Regulasi Pelayanan Adminduk
- 2) Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Publik

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perumusan program dan kegiatan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah disusun sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capkin	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target Capkin	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	13	15	16
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			6.068.368.145,00					6.761.154.677,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.068.368.145,00					6.761.154.677,00
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.068.368.145,00					6.761.154.677,00
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	5.566.799.944,00				-	6.283.433.586,00
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %	68.728.857,00			9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	101.035.323,00
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	17.482.546,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga		2.174.390,00

									Semua Kel/Desa		stabilitas sosial kemasyarakatan		
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	13.446.127,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		3.601.184,00
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	18.236.274,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		44.860.195,00
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	19.563.910,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		50.399.554,00

	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	100 %	4.076.914.632,00			9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	3.521.599.853,00
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	4.052.225.732,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		3.468.339.789,00
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	24.688.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		53.260.064,00
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat dengan Baik	95 %	25.879.137,00			9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	52.500.000,00
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.879.137,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		52.500.000,00
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80 %	100 %	76.670.839,00			9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	35.727.241,00
	2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43 Dokumen	34.778.719,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		15.750.000,00
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	41.892.120,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		19.977.241,00
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100 %	277.876.910,00			9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	1.239.890.658,00
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.268.910,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		1.120.348.698,00	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	79.608.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		119.541.960,00	
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase validasi aset OPD	100 %	339.228.600,00			9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	600.000.000,00
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	339.228.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		600.000.000,00	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100 %	594.647.169,00			9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	610.329.263,00
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176.545.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		187.881.170,00
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	418.101.269,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		422.448.093,00
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100 %	106.853.800,00			9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	122.351.248,00
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	106.853.800,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		122.351.248,00
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP Elektronik Persentase penerbitan KIA Persentase penerbitan surat pindah	99.01 % 49,92 % 100 %	153.726.942,00				-	163.518.600,00

	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	74.348.760,00			Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	76.125.000,00
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	125 Dokumen	10.059.182,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		23.625.000,00
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk								
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	16500 Dokumen	64.289.578,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		52.500.000,00

	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan Hasil Penyelenggaraan Penduduk	1 Laporan	79.378.182,00			Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	87.393.600,00
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	32400 Dokumen	79.378.182,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		87.393.600,00
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	98 %	124.560.351,00				-	177.754.607,00
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	4 Dokumen	124.560.351,00			Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	177.754.607,00
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								

							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	64.289.578,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		11.885.530,00
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil								
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	60.270.773,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		165.869.077,00
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	OPD yang telah melaksanakan kerjasama	12 %	204.432.953,00				-	96.447.884,00
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan Pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	62.303.773,00			Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	52.500.000,00

	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan							
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	62.303.773,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		52.500.000,00
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan pengelolaan Informasi Adminduk	1 Dokumen	80.135.364,00		Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	30.000.000,00
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
						Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 Dokumen	80.135.364,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		30.000.000,00

	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	61.993.816,00			Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	13.947.884,00
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	15.135.360,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		5.202.000,00
	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan								
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	46.858.456,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		8.745.884,00

5	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	3 %	18.847.955,00				-	40.000.000,00
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen data kependudukan	1 Dokumen	18.847.955,00			Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	40.000.000,00
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain								
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	18.847.955,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan		40.000.000,00
							J U M L A H		6.068.368.145,00					6.761.154.677,00

BAB V

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dan salah satu pelaksana urusan pemerintah daerah yang memiliki tugas sebagai penyelenggaraan dan penataan layanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu tidak salah jika Dinas Dukcapil mendapat peran yang sangat vital bagi citra pemerintah daerah, karena dapat dikatakan etalase, wajah atau cerminan dari pelaksanaan pemerintah daerah dapat dilihat dari satuan kerja/organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Berdasarkan pagu indikatif yang tersedia, dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lombok Tengah, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.134.368.145,00 (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah(.pada dengan target Indikator kinerja adalah:

- 1) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 98.00 %
- 2) Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebesar 99.01 %
- 3) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 49.92 %
- 4) Persentase Penerbitan Surat Pindah sebesar 100.00 %
- 5) Persentase Kerjasama Layanan Adminduk sebesar 12%
- 6) Persentase Pemanfaatan Data Adminduk sebesar 3%

Sejauh ini, dalam upaya peningkatan kinerja dan kualitas layanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dibutuhkan setidaknya:

- 1) Peningkatan mutu sarana dan pra sarana penunjang layanan adminduk yang memadai, utamanya pada sarana pelayanan reguler dan pelayanan keliling adminduk;
- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, dalam rangka menciptakan kondisi petugas layanan adminduk yang profesional; dan
- 3) Peningkatan kualitas jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Dengan demikian, diharapkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 dapat terserap secara optimal untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dalam rangka menciptakan kondisi layanan Adminduk yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan.

